



Gaya Komunikasi Politik Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban Periode 2019-2024

Andi Surya¹⁾, Satya Irawatiningrum²⁾

Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, Indonesia

andysurya1945@gmail.com¹⁾

regzinata2012@gmail.com²⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam gaya komunikasi politik Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban periode 2019–2024, H.M. Miyadi, dalam melaksanakan tiga fungsi utama lembaga legislatif. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya komunikasi politik sebagai instrumen strategis dalam membangun legitimasi, menjaga keharmonisan antar anggota, serta menciptakan efektivitas dalam proses pengambilan keputusan politik di tingkat daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketua DPRD Tuban lebih dominan menggunakan gaya komunikasi konteks rendah (*low context communication*), yang ditandai dengan penyampaian pesan secara lugas, eksplisit, dan langsung pada inti persoalan, sehingga mudah dipahami oleh komunikan. Selain itu, Miyadi juga dikenal memiliki pola komunikasi yang cepat, tegas, dan berorientasi pada *problem-solving* dalam menghadapi isu-isu mendesak. Tingkat kepercayaan diri yang tinggi diperkuat oleh legitimasi politik melalui kemenangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) baik dalam kontestasi legislatif. Meskipun memiliki pendirian yang kuat, Ketua DPRD tetap membuka ruang dialog, menerima masukan, dan mengedepankan gaya komunikasi persuasif dalam forum deliberatif. Dengan kombinasi tersebut, gaya komunikasi politik Ketua DPRD Tuban tidak hanya menunjukkan efektivitas kepemimpinan, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap konsolidasi politik internal dan penguatan demokrasi lokal.

Kata kunci: DPRD, Gaya Komunikasi, Kepemimpinan, Komunikasi Politik, Tuban

Abstract

This research provides an in-depth analysis of the political communication style of H.M. Miyadi, Chairman of the Tuban Regency Regional People's Representative Council (DPRD) for the 2019–2024 period, as he executed the three primary functions of the legislature. The study is grounded in the importance of political communication as a strategic instrument for building legitimacy, maintaining harmony among members, and ensuring effective political decision-making at the regional level. Employing a qualitative descriptive approach, data was gathered through in-depth interviews, participatory observation, and documentation analysis. The findings show the Chairman predominantly uses a low-context communication style, characterized by the straightforward, explicit, and direct delivery of messages. Furthermore, Miyadi is known for a communication pattern that is fast, firm, and problem-solving oriented when addressing urgent issues. His high self-confidence is reinforced by the political legitimacy gained through the National Awakening Party's (PKB) legislative victory. Despite his strong stance, the Chairman remains open to dialogue, accepts input, and prioritizes a persuasive communication style in deliberative forums. Through this combination, the Chairman's political communication style not only demonstrates effective leadership but also contributes significantly to internal political consolidation and the strengthening of local democracy.

Keyword: Communication Style, Leadership, Local Parliament, Political Communication, Tuban



PENDAHULUAN

Komunikasi politik memegang peranan terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Dalam proses politik, komunikasi politik memegang peranan penting terutama dalam menyampaikan pesan-pesan politik di dalam parlemen. Oleh karena itu, sebagai seorang anggota parlemen kredibilitas, kemampuan dan keahlian dalam berkomunikasi sangat diperlukan (Chumaeson, 2021). Karena aspek-aspek tersebut erat kaitannya dengan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh lembaga legislatif, terutama pada fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan maupun fungsi komunikasi.

Namun pada prakteknya, fungsi-fungsi yang sudah diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar tersebut seolah-olah tidak berjalan sebagai mana yang diharapkan oleh masyarakat. Jika kita melihat kebelakang, kinerja parlemen Indonesia telah menjadi sorotan masyarakat luas. Dari 263 rencana undang-undang yang bisa disahkan, hanya sepuluh persen yang telah dituntaskan. Melihat realitas tersebut, masyarakat menilai bahwa lembaga legislatif masih belum bisa menjalankan amanah undang-undang dengan baik. Bahkan mirisnya lagi, hingga penghujung berakhirnya jabatan anggota DPR periode 2019-2024 masih ada undang-undang yang dianggap publik penting dan mendesak tetapi belum terselesaikan (HIDAYAT SALAM, 2024). Melihat masih minimnya rancangan undang-undang yang sampai pada penghujung jabatan berakhir masih belum terselesaikan, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kendala komunikasi politik dalam rumah tangga parlemen itu sendiri.

Namun, dewasa ini persoalan menyangkut komunikasi bukan hanya terjadi di dalam parlemen tingkat pusat. Permasalahan juga terjadi di tingkat daerah, baik Propinsi hingga Kabupaten/Kota. Kasus demi kasus yang terjadi bukan hanya menyangkut tugas yang selama ini diemban oleh anggota Parlemen semata. Namun juga masalah kaharmonisan antar anggota parlemen.

Dihimpun dari laman kompas.com diberitakan, anggota DPR RI Deddy Sitorus hampir baku hantam dengan politisi Gerindra Immanuel Ebenezer ketika mereka menjadi narasumber di sebuah stasiun televisi swasta. Tidak hanya berhenti disitu saja, ketidak harmonisan komunikasi antar anggota dewan juga terjadi hingga tingkat daerah. Terbaru tiga anggota DPRD Aceh terlibat saling adu pukul di sela-sela rapat paripurna tentang pandang akhir fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban APBA 2020. Sedangkan dari Kabupaten Sumenep, dua kader Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Iwan Budiharto dan A.F. Hari Pontoh, terlibat perkelahian di Gedung DPRD Sumenep. Selanjutnya Mulyadi yang merupakan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dan Mustofa Assegaf anggota Komisi VII sempat adu pukul di sela-sela rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM Sudirman Said. (Agne & Agne, 2024).

Kejadian-kejadian di atas, mencerminkan bagaimana interaksi yang terjalin antara anggota dewan sangat memprihatinkan. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Ada aksi dan ada reaksi (Mulyadi & Liauw, 2020). Tidak sewajarnya masalah-masalah tersebut terjadi jika antara anggota dewan terjalin sebuah interaksi yang baik. Seperti yang diketahui bersama, sebuah interaksi tidak akan pernah terjadi mana kala tidak dibarengi dengan komunikasi. Semua ini dikarenakan salah satu syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya komunikasi. Dengan adanya komunikasi antara orang yang terlibat didalam interaksi sosial tersebut (baik komunikasi dalam bentuk verbal maupun nonverbal) seseorang bisa menafsirkan pada perilaku yang muncul dari diri orang lain.

Sementara itu, sejauh ini, suasana komunikasi di DPRD Kabupaten masih kondusif. Kodusifitas komunikasi pun tidak hanya terjadi di kalangan internal. Namun keharmonisan komunikasi politik juga terjalin dengan jajaran eksekutif. Hasilnya, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban memperoleh Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 7 kali berturut-turut (Sekretariat, 2022).

Soekanto menyebutkan dengan adanya komunikasi, sikap-sikap dan perasaan-perasaan suatu kelompok manusia atau orang perorangan dapat diketahui oleh kelompok-kelompok lain atau orang-orang lain. Hal itu kemudian merupakan bahan untuk menentukan reaksi apa yang akan ditentukan. Dengan demikian komunikasi memungkinkan kerjasama antara orang



perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan memang komunikasi merupakan salah satu syarat terjadinya kerja sama. Akan tetapi, tidak semua komunikasi menghasilkan kerja sama bahkan suatu pertikaian akan terjadi sebagai akibat dari salah paham atau karena masing-masing pihak tidak mau saling mengalah (Soekanto, 2012).

Komunikasi merupakan bagian integral dari sebuah proses sosial. Esensinya, komunikasi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial, terutama ketika sedang menjalin sebuah kerja sama dengan orang lain atau ketika sedang berhubungan dengan kelompok yang lain. Proses komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang-orang lain. Proses komunikasi tidak pernah lepas dari pemilihan gaya komunikasi. Gaya komunikasi yang digunakan seseorang ketika sedang melakukan komunikasi bisa dilihat dari bagaimana pemilihan Bahasa, bagaimana mengolah kata (beretorika), bagaimana menggunakan gesture. Oleh karena itu, setiap orang memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan dirinya dengan orang lain. Salah satu ciri khas yang membedakan satu orang dengan orang lain adalah gaya komunikasi yang digunakan ketika melakukan komunikasi. Setiap komunikator, bebas memilih gaya komunikasinya masing-masing. Selain itu gaya komunikasi juga bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi komunikasi yang terjadi. Gaya maupun ciri khas yang dimiliki oleh seseorang ketika berbicara, pada umumnya merupakan warisan yang diperoleh dari budaya. Sedangkan kemandirian seseorang dalam berkomunikasi harus diperoleh melalui proses pendidikan, baik pendidikan secara formal maupun non formal (Panuju, 2018).

Gaya komunikasi memang ada bermacam-macam. Setiap komunikator bisa menggunakan lebih dari satu gaya komunikasi ketika sedang menyampaikan pesan (Liliwari, 2010). Selain itu, pemilihan gaya komunikasi komunikasi politik yang tepat, juga akan mempengaruhi umpan balik dari komunikan. Oleh karena itu, dari berbagai gaya komunikasi politik, komunikator memilih untuk menggunakan gaya komunikasi yang tepat agar dalam menyampaikan pesan mendapatkan tanggapan yang baik serta hal-hal yang akan disampaikan tersalurkan dengan baik (Pratiwi, 2017).

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Sofi Hansa dengan judul gaya komunikasi dan bentuk konstruksi citra politik anggota legislatif perempuan di Indonesia menunjukkan. Gaya komunikasi politik dari Mulan Jameela lebih terlihat didominasi oleh gaya komunikasi politik kontekstual tinggi (*high context culture*) yang ditandai dengan komunikasi tidak secara langsung. Sementara gaya komunikasi Anita Jacoba Gah dan Riezky Aprilia lebih didominasi oleh gaya komunikasi politik kontekstual rendah (*low context culture*) atau dengan komunikasi langsung (Hasna, 2023).

Setiap pemimpin politik memiliki gaya komunikasi politik sendiri-sendiri. baik secara verbal maupun nonverbal yang bertujuan untuk menarik simpati dari lawan bicara. Keberhasilan dapat dilihat dari perubahan yang terjadi masa kepemimpinannya perubahan dalam infrastruktur, kesejahteraan masyarakat dan peningkatan perekonomian di daerah (Naibaho, 2016).

Komunikasi politik memainkan peran yang sangat penting di dalam suatu sistem politik. Ia merupakan elemen dinamis, dan menjadi bagian yang menentukan proses-proses sosialisasi politik, partisipasi politik, dan rekrutmen politik. Sedangkan dalam konteks sosialisasi politik, komunikasi politik dipandang sebagai proses pembelajaran, penerimaan, persetujuan atas kebiasaan-kebiasaan (*custome*) atau aturan-aturan (*rule*) struktur, dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kehidupan politik. Ia menempati posisi penting dalam kehidupan sosial politik karena dapat mempengaruhi kualitas interaksi antara masyarakat dan penguasa. Karena itu, jika demokrasi mensyaratkan adanya relasi-relasi kekuasaan yang berkualitas antara rakyat dan penguasa, maka komunikasi politik menjadi faktor yang menentukan wujud demokratis tersebut. Sebab sistem politik sendiri tidak dapat beroperasi dengan baik tanpa adanya dukungan masa yang sikap dan perilaku politiknya digerakkan oleh kekuatan pesan-pesan yang tersosialisasi melalui kegiatan komunikasi politik (Muhtadi, 2008).

Sedangkan dalam konteks komunikasi politik, kemampuan untuk memproyeksikan diri sendiri ke dalam sudut pandang dan empati orang lain akan memberi peluang kepada seorang politikus untuk berhasil ke dalam pembicaraan politik. Namun, untuk bisa memproyeksikan diri ke dalam sudut pandang seseorang itu tidak mudah. Maka daripada itu, empati bisa

dikembangkan oleh seorang politikus atau komunikator politik melalui komunikasi sosial maupun komunikasi politik yang sering dilakukan (Arifin, 2011). Dalam usaha melakukan empati, Roger dan Shoemaker (1971) memperkenalkan homofili. Homofili sebagai kemampuan individu untuk menciptakan kebersamaan. Baik kebersamaan secara fisik maupun mental. Homofili dapat digambarkan sebagai suasana dan kondisi kepribadian fisik dua orang yang berinteraksi karena memiliki kesamaan usia, bahasa, pengetahuan, kepentingan organisasi, agama, partai, suku bangsa dan pakaian.

Berdasarkan kajian literatur, manusia berkomunikasi dengan sekurang-kurangnya tiga gaya, meskipun secara aktual setiap orang bisa saja mempunyai hampir 1.000 gaya komunikasi yang berbeda. Tetapi semua komunikasi selalu dilakukan secara: (1) visual; (2) auditorium; dan (3) kinesika. Edward T. Hall membedakan budaya komunikasi manusia dibedakan menjadi dua macam. Yaitu budaya komunikasi konteks Tinggi atau High Context Culture (HCC) dan budaya komunikasi konteks rendah atau Low Context Culture (LCC). Masing-masing dari konteks budaya komunikasi tersebut mempunyai beberapa perbedaan penting dalam gaya komunikasi seseorang (Prof. Dedy Mulyana, M.A., 2014).

Dari kedua konteks budaya di atas, bangsa-bangsa timur, termasuk bangsa Indonesia, umumnya menganut kebudayaan konteks tinggi. Sedangkan bangsa-bangsa barat pada umumnya menganut kebudayaan konteks rendah (Lesmana & SBY, 2008). Berdasarkan literatur yang di atas dan melihat fenomena-fenomena yang terjadi saat ini, peneliti ingin mengetahui dan menganalisis gaya komunikasi politik ketua DPRD kabupaten Tuban periode 2019-2024 dengan sesama anggota dewan selama menjalankan tugas-tugas legislasi.

METODE

Berdasarkan penjabaran yang telah diuraikan pada bagian terdahulu dan melihat realita yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti memilih jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. yang terdiri dari perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Moleong, 2021). Sementara lokasi penelitian akan dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tuban yang beralamatkan di Jalan Teuku Umar No 1-A Tuban Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan karena tersedianya data yang dibutuhkan oleh peneliti dan lokasinya mudah dijangkau. Selain itu juga adanya keterbukaan informasi dari pihak yang bersangkutan, sehingga memudahkan peneliti di dalam melaksanakan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang tengah dihadapi (Sugiyono, 2016). Sedangkan teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipasi dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi dimana hal ini tidak bisa ditemukan dalam observasi. sedangkan teknik analisis data akan dilakukan dengan teknik analisis interpretatif dari Miles, Huberman dan Saldana (Kriyantono, 2022). Pada analisis data jenis ini mengemukakan bahwa aktifitas dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus sehingga datanya sudah jenu. Aktivitas analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, dan data *conclusion drawing/verivation* (Kriyantono, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

H.M Miyadi, Sg. MM merupakan Ketua DPRD Kabupaten Tuban Perode 2019-2024 dan periode 2019-2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa. Beliau lahir di Bojonegoro pada tanggal 21 April 1968. Beliau berhasil menduduki kursi pemimpi parlemen Kabupaten Tuban setelah partainya memenagkan pemilihan legislatif. Sehubungan posisinya sebagai ketua dewan, dalam hal ini beliau harus mampu menjalin dan melakukan komunikasi politik dengan siapa saja secara intensif. Karena komunikasi politik adalah suatu cara untuk menciptakan, mendistribusikan, memproses, menyimpan dan menukar informasi yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi

para audiens politik (Putri, 2021). Selama ini komunikasi yang dilakukan oleh beliau banyak dilakukan secara langsung.

Menurut pengakuan narasumber "N" mengatakan, selama menjabat sebagai ketua DPRD, komunikasi politik yang telah dibangun saat ini sangat mudah untuk dipahami. Karena sebagai ketua, Miyadi sering menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak terlalu banyak menggunakan perumpamaan. Dengan kata lain pesan-pesan yang disampaikan oleh Miyadi berupa pesan verbal dan secara eksplisit. Dalam berbicara, Ketua DPRD cenderung berbicara secara terus terang dan langsung pada pokok permasalahan (*Low Context Culture*) (Liliweri, 2010). Bagi para penganut komunikasi konteks ini, pesan yang disampaikan tidak bermakna bias. Artinya mereka menyampaikan pesan dengan makna seperti apa yang diucapkan. Mereka mengatakan apa yang mereka maksud dan memaksudkan apa yang mereka katakan. Selain itu, dalam komunikasi Miyadi banyak mempunyai lebih banyak alternatif pesan, oleh karena itu, kemungkinan dari komunikasi dalam meramalkan pesan yang disampaikan akan semakin berkurang. Sehingga komunikasi tidak mengalami kesulitan dalam memahami arti pesan yang disampainya. Pesan yang disampaikan adalah jelas, berterus terang, dan disampaikan secara langsung atau lugas. Atau dengan istilah *the meaning of the message is in the message itself*.

Seperti pada umumnya, komunikator komunikasi politik harus mampu menjalin komunikasi dengan baik. Dalam hal ini, pesan yang disampaikan oleh komunikator akan dengan mudah dipahami oleh komunikasi. Sehingga komunikasi dapat dengan mudah memahami apa yang diinginkan oleh komunikator. Selain menggunakan bahasanya yang mudah dipahami, bapak Miyadi juga dikenal sebagai orang yang cepat. Cepat dalam pengertian ini, adalah yang menyangkut dalam pengambilan keputusan atau kebijakan-kebijakan.

Selain itu, dalam pengambilan keputusan, komunikasi dilakukan dengan cepat dan tegas. Ketua Dewan berbicara dengan cepat dan bahasa yang digunakan pun sesuai dengan topik yang dibicarakan. Sehingga siapa saja yang berbicara dengannya akan dengan mudah mengerti apa yang sedang disampaikan. Selain bahasa yang mudah dipahami, beliau juga cepat dalam menyelesaikan suatu masalah. Dalam pandangan "S", Ketua Dewan tergolong orang yang cepat dalam menangani sebuah permasalahan yang mencuat di permukaan. Informan "S" menjelaskan bahwa pada suatu kesempatan ketika Komisi B DPRD Kabupaten Tuban akan melakukan kunjungan kerja ke luar daerah, pihaknya telah mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada lembaga yang akan dituju. Namun, surat tersebut tidak memperoleh balasan sebagaimana lazimnya. Dalam perjalanan menuju lokasi, rombongan melakukan konfirmasi ulang untuk memastikan bahwa kunjungan telah terjadwal. Akan tetapi, pihak yang dituju justru menyatakan bahwa belum pernah menerima surat pemberitahuan dari DPRD Tuban. Kondisi ini menimbulkan kebingungan bagi "S", salah satu anggota Komisi B, karena ia merasa surat telah dikirimkan dengan alamat yang jelas dan sesuai prosedur. Menyadari adanya permasalahan, S kemudian berinisiatif untuk segera melakukan konfirmasi kepada Ketua DPRD, Miyadi, guna meminta arahan lebih lanjut terkait keberlangsungan kunjungan tersebut, mengingat tiket pesawat dan akomodasi telah dipesan sebelumnya.

Menanggapi laporan tersebut, Ketua DPRD Miyadi memberikan jawaban singkat: "Ya sudah, biar saya yang mengurus." Meskipun pernyataan tersebut terdengar sederhana, informan menilai bahwa kalimat tersebut menyiratkan beragam kemungkinan, seperti pembatalan agenda kunjungan atau pengalihan ke lokasi lain. "S" sempat berasumsi bahwa Ketua DPRD akan memilih untuk membatalkan kunjungan Komisi B. Namun, tidak lama kemudian, Ketua DPRD kembali menghubungi "S" dan menyampaikan bahwa kunjungan tetap dapat dilanjutkan karena persoalan administrasi telah diselesaikan.

Peristiwa tersebut memperlihatkan adanya dugaan kelalaian dalam manajemen administrasi, karena surat yang dikirimkan sebenarnya sudah sampai, tetapi belum diteruskan kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan. Menariknya, Ketua DPRD tidak serta-merta menyalahkan bagian administrasi, melainkan berusaha terlebih dahulu menelusuri akar permasalahan. Sikap ini mencerminkan gaya komunikasi politik yang cenderung *problem-solving*

dan akomodatif. Ini menunjukkan komunikasi politik tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan pesan, tetapi juga mengandung upaya mengelola konflik, mencari solusi, serta membangun legitimasi (Nimmo, 2000). Hal ini diperkuat dengan gaya komunikasi seorang pemimpin dapat memengaruhi bagaimana bawahan maupun mitra kerja menafsirkan situasi krisis (DeVito & DeVito, 2019). Dengan demikian, respons Miyadi dapat dipahami sebagai upaya strategis untuk menjaga citra kelembagaan DPRD sekaligus memastikan agenda politik tetap berjalan sesuai rencana.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak "R", dan juga anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Waktu ditemui disela-sela kesibukannya, beliau menuturkan bahwa dalam hal yang menyangkut sebuah permasalahan yang bersifat mendesak, ketua Dewan sangat cepat dalam mengambil keputusan. Bukan cuma dalam mengambil keputusan, tetapi juga dengan solusi untuk menyelesaikannya. Bagi beliau Ketua dewan adalah orang dengan tipe yang tidak mau mendiagnosis masalah berlarut-larut, tidak peduli apakah itu masalah yang menyangkut tugas-tugas sebagai anggota legislative atau pun tugas-tugas lainnya.

Sebagai seorang komunikator politik, dan juga sebagai anggota organisasi politik membutuhkan media untuk menyampaikan pesan politik kepada masyarakat (Putri, 2021). Agar suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator bisa diterima dengan baik maka dibutuhkan saluran atau media untuk penyampaian pesan. Dalam melakukan komunikasi politik dengan anggota yang lain, komunikasi banyak yang dilakukannya melalui forum-forum resmi seperti rapat, baik dalam rapat paripurna, rapat bersama pimpinan komisi maupun rapat fraksi. Artinya Segala sesuatu yang menyangkut keputusan akan selalu dilakukan secara prosedural (Silviani, 2020). Jika ada persoalan yang menyangkut urusan personal, Ketua Dewan akan melakukan komunikasi intensif secara personal maka ia berusaha untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain atau dengan kata lain melakukan empati. dalam hal ini, ketua dewan mencoba untuk berempati dengan lawan bicara. berempati adalah bagaimana seseorang memposisikan diri pada orang. Seseorang hanya akan bisa melihat dunia seperti apa yang orang lain lihat hanya bila berempati (Joseph A. DeVito and Agus Maulana, 2011).

Komunikasi secara langsung yang bersifat personal adalah untuk menyelesaikan masalah secara kebersamaan. Sebagai gambaran, masih menurut Bapak "R" menceritakan, suatu waktu ada seorang anggota dewan yang tersangkut masalah administrasi. Seketika itu juga, anggota yang dimaksud dipanggil untuk menghadap.

Selain dalam penyelesaian persoalan yang bersifat mendesak, gaya komunikasi politik Ketua DPRD Tuban, Miyadi, juga tampak dalam proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Informan "C" menjelaskan bahwa pembahasan APBD yang secara substansi memuat materi sangat kompleks, dapat diselesaikan hanya dalam kurun waktu sekitar satu minggu. Padahal, dokumen APBD dicetak dalam bentuk buku yang tebal, yang seharusnya memerlukan waktu lama untuk dibaca, ditelaah, dan dianalisis secara detail. Informan "C" juga menyebut bahwa kecepatan pembahasan tersebut bisa dikatakan sebagai salah satu yang tercepat sepanjang sejarah Kabupaten Tuban, bahkan mungkin di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya efektivitas koordinasi politik dan kepemimpinan yang kuat dalam mengelola agenda strategis lembaga legislatif.

Selain kecepatan dalam menyelesaikan persoalan, tingkat kepercayaan diri Ketua DPRD juga dinilai tinggi. Informan "C" menegaskan bahwa rasa percaya diri Miyadi semakin meningkat karena didukung oleh kemenangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam pemilu legislatif. Kemenangan politik tersebut secara tidak langsung memberikan legitimasi dan dukungan eksekutif yang kuat, sehingga memperkuat posisi Ketua DPRD dalam mengambil keputusan. Literatur menjelaskan bahwa legitimasi politik yang didukung oleh kemenangan elektoral sering kali berimplikasi pada peningkatan political efficacy dan rasa percaya diri pemimpin politik dalam menjalankan perannya (Norris, 2011).

Lebih jauh, rasa percaya diri Ketua DPRD tidak hanya didasarkan pada dukungan politik, tetapi juga pada pendirian yang kuat. Informan "R" menambahkan bahwa dalam pembahasan terkait hak dan kewajiban anggota dewan, terutama mengenai usulan kenaikan tunjangan

sebagaimana diatur dalam PP No. 18, Ketua DPRD tetap konsisten pada prinsipnya. Meskipun banyak anggota yang mendesak kenaikan, Miyadi hanya menyetujui sebagian kecil karena menilai prioritas utama anggaran harus diarahkan pada bidang yang lebih penting untuk kesejahteraan masyarakat. Sikap ini sejalan dengan pandangan Yukl, yang menyatakan bahwa pemimpin efektif adalah mereka yang mampu menyeimbangkan kepentingan kelompok dengan visi organisasi yang lebih luas.

Dalam konteks komunikasi politik formal, rapat-rapat, sidang, dan musyawarah di DPRD kerap diwarnai dengan perbedaan pandangan antaranggota, terutama ketika membawa aspirasi dari kelompok yang diwakili. Proses deliberasi semacam ini merupakan bagian dari komunikasi politik deliberatif yang menekankan pentingnya negosiasi, kompromi, dan pencarian titik temu (Habermas, 1996). Menurut "R", dalam menghadapi dinamika tersebut, Ketua DPRD biasanya memberikan penjelasan dan pengertian kepada anggota lain, dengan tetap memperhatikan program-program prioritas pemerintah daerah. Hal ini menggambarkan gaya komunikasi persuasif dan akomodatif yang memfokuskan pada penyatuan persepsi, sebagaimana diketahui bahwa komunikasi efektif dalam kelompok membutuhkan penyesuaian pesan agar tercapai kesepahaman bersama.

Lebih lanjut, meskipun Miyadi dikenal memiliki pendirian yang kuat, ia tidak menutup diri terhadap masukan yang berbeda. Apabila terdapat usulan yang tidak sejalan, Miyadi tidak serta-merta menolaknya, tetapi memberikan alasan yang jelas dan argumentatif. Hanya dalam hal prinsip yang berkaitan dengan prioritas anggaran publik, ia tetap tegas mempertahankan posisinya. Sikap ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinannya bersifat asertive namun tetap terbuka pada dialog, sesuai dengan konsep kepemimpinan demokratis yang menekankan keseimbangan antara ketegasan dan partisipasi (Aprilistyan & Ikhwan, 2022).

Menariknya, rasa percaya diri tersebut juga tercermin dalam hubungan internal fraksi. Informan "R" menjelaskan bahwa Ketua DPRD sering menginisiasi rapat koordinasi dengan anggota Fraksi PKB di ruang kerjanya untuk membahas persoalan strategis. Padahal, secara struktural, fungsi koordinasi seharusnya menjadi kewenangan Ketua Fraksi, bukan Ketua DPRD. Namun, peran aktif Miyadi dalam forum fraksi menunjukkan adanya konsolidasi politik internal yang kuat, sekaligus menegaskan pengaruh kepemimpinan formalnya melampaui sekadar posisi kelembagaan. Dalam teori komunikasi politik, hal ini dapat dikategorikan sebagai praktik komunikasi hegemonik, di mana pemimpin politik menggunakan otoritas formal dan legitimasi politik untuk memperluas pengaruhnya dalam arena organisasi (Sampurna et al., n.d.).

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa gaya komunikasi politik Ketua DPRD Kabupaten Tuban periode 2019–2024 didominasi oleh pola komunikasi konteks rendah yang lugas, tegas, dan langsung. Miyadi mampu merespons persoalan mendesak dengan cepat melalui pendekatan problem-solving dan akomodatif. Tingkat kepercayaan diri yang tinggi ditopang oleh dukungan politik partai pemenang pemilu, namun hal tersebut tidak menutup ruang dialog dan kompromi dalam forum deliberatif. Dengan kombinasi ketegasan dan keterbukaan, gaya komunikasi ini memperlihatkan kepemimpinan yang efektif, memperkuat konsolidasi politik internal, serta berkontribusi pada penguatan demokrasi lokal.

Selain itu, dari hasil penelitian ini, peneliti menyarankan supaya DPRD Tuban perlu terus mengembangkan budaya komunikasi deliberatif agar perbedaan pandangan antar-anggota dapat dikelola secara lebih konstruktif. Selanjutnya Ketua DPRD sebaiknya memperkuat komunikasi publik melalui media digital untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Agne, Y., & Agne, Y. (2024). *Deddy Sitorus Ribut dengan Noel, Siapa Saja 5 Anggota DPR yang Pernah Terlibat Perkelahian?* <https://www.tempo.co/politik/deddy-sitorus-ribut-dengan-noel-siapa-saja-5-anggota-dpr-yang-pernah-terlibat-perkelahian--78882>



- Aprilistyan, S. F., & Ikhwan, K. (2022). Kontribusi komunikasi asertif dan kepemimpinan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja: kajian literatur. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(6), 389–400.
- Arifin, A. (2011). *Komunikasi politik: filsafat, paradigma, teori, tujuan, strategi, dan komunikasi politik Indonesia*. Graha Ilmu.
- Chumaeson, W. (2021). Strategi Komunikasi Politik Gkr Ayu Koes Indriyah Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Dapil Jawa Tengah Periode 2014-2019 Terhadap Konstituennya di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 3(01), 10–17.
- DeVito, J. A., & DeVito, J. (2019). The interpersonal communication book. *Instructor*, 1(18), 521–532.
- Deddy Mulyana, . . (2014). *ILMU KOMUNIKASI Suatu Pengantar*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. MIT Press.
- Hasna, S. (2023). Gaya Komunikasi dan Bentuk Konstruksi Citra Politik Anggota Legislatif Perempuan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Media, Public Relations, Dan Komunikasi (IMPRESI)*, 4(1), 12–31.
- HIDAYAT SALAM. (2024). *Yang Kilat dan Tak Kunjung Usai dari Legislasi DPR 2019-2024*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/artikel/yang-kilat-dan-tak-kunjung-usai-dari-legislasi-dpr-2019-2024>
- Joseph A. Devito and Agus Maulana. (2011). *Komunikasi Antarmanusia* (L. saputra Dkk (ed.); Edisi Keli). Karisma Publising Group.
- Kriyantono, R. (2022). *Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif: Edisi Kedua*. Prenada Media.
- Lesmana, T., & SBY, D. S. S. (2008). *Intrik dan Lobi Politik Para Penguasa*. Gramedia.
- Liliweri, A. (2010). *Komunikasi serba ada serba makna*. Kencana.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhtadi, A. S. (2008). *Komunikasi politik indonesia: dinamika islam politik pasca-orde baru*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Y. Y., & Liauw, F. (2020). Wadah interaksi sosial. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 2(1), 37–44.
- Naibaho, R. M. (2016). *Opini Pemuka Masyarakat Terhadap Gaya Komunikasi Pemimpin (Studi Kasus Gaya Komunikasi Verbal dan Non Verbal Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu)*.
- Nimmo, D. (2000). *Komunikasi politik: komunikator, pesan, dan media* (4th ed.). Remaja Rosdakarya.
- Norris, P. (2011). *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge University Press.
- Panuju, R. (2018). *Pengantar Studi (Ilmu) Komunikasi: Komunikasi Sebagai Kegiatan Komunikasi Sebagai Ilmu*. Kencana.
- Pratiwi, B. N. (2017). Analisis Gaya Komunikasi Ahmad Faiz Zainuddin. *Jurnal Ilmu Komunikasi Unmul*, 5(3), 376–387.
- Putri, A. N. A. (2021). Gaya Komunikasi Politik Twitter Partai Gerindra. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 5(2), 105–113.
- Sampurna, A., Hakim, F., Syahputra, A., Handayani, R., & Simbolon, M. B. (n.d.). *Komunikator Politik dan Kepemimpinan Politik*.
- Sekretariat. (2022). *7 Kali Berturut-turut Raih WTP, Bukti DPRD dan Pemkab Tuban Harmonis*. Dprd-Tuban.Go.Id. <https://dprd-tuban.go.id/2022/04/29/7-kali-berturut-turut-raih-wtp-bukti-dprd-dan-pemkab-tuban-harmonis/>
- Silviani, I. (2020). *Komunikasi organisasi*. Scopindo Media Pustaka.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi: suatu pengantar*.
- Sugiyono, P. (2011). Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. *Alfabeta, Bandung*.